JAE: JURNAL AKUNTANSI DAN EKONOMI
AKREDITASI NO. 0173/C3/DT.05.00/2025
DOI: 10.29407/jae.v11i2.27235

E ISSN 2541-0180
P ISSN 2721-9313

IMPLEMENTASI ALOKASI DANA DESA DALAM UPAYA PEMBANGUNAN EKONOMI DI DESA BONJERUK KECAMATAN JONGGAT KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Nabila[1], Himawan Sutanto[2], Irwan Suriadi[3]
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mataram
nabilabila45401@gmail.com

Informasi Artikel

Tanggal Masuk:
6 Oktober 2025

Tanggal Revisi:
16 Oktober 2025

Tanggal Diterima:
19 Nopember 2025

Publikasi Online:
24 Nopember 2025

Abstract

This study aims to examine the implementation of the Village Fund Allocation (ADD) in Bonjeruk Village, Jonggat District, Central Lombok Regency, in relation to economic development and its contribution to improving community welfare. The research employed a quantitative approach with data collection techniques were carried out through documentation and brief interviews, which served as supporting data to clarify several pieces of information derived from the quantitative dataset. The data were analyzed using descriptive quantitative techniques, including the presentation of tables, percentages, and data distributions to illustrate the implementation of the Village Fund Allocation (ADD). The results show that the implementation of ADD in Bonjeruk Village is predominantly directed toward physical development, particularly infrastructure improvements that facilitate community economic activities, while non-physical (empowerment) programs remain limited. Approximately 70% of the budget is focused on physical development, with community participation being relatively high during the planning stage but low during the supervision stage. The contribution of ADD can be seen in improved economic accessibility, the role of the Village-Owned Enterprise (BUMDes) in supporting local businesses, and support for social programs such as Direct Cash Assistance (BLT), youth activities, and tourism awareness groups.

Keywords: Village, Village Fund Allocation, Economic Development.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah dalam pembangunan ekonomi serta kontribusinya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif dengan Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumetasi dan wawancara singkat yang digunakan sebagai data pendukung untuk memperjelas beberapa informasi dari data kuantitaif. Data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif berupa penyajian tabel, persentase, dan distribusi data untuk menggambarkan implementasi alokasi dana desa (ADD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ADD di Desa Bonjeruk lebih banyak diarahkan pada pembangunan fisik, khususnya perbaikan infrastruktur yang memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat dan pada pembangunan non fisik (pemberdayaan) masih terbatas serta 70% anggaran difokuskan pada pembangunan fisik; partisipasi masyarakat cukup tinggi pada tahap perencanaan namun rendah pada tahap pengawasanKontribusi ADD terlihat pada peningkatan aksesibilitas ekonomi, peran BUMDes dalam membantu usaha lokal, serta dukungan terhadap program sosial seperti BLT (Bantuan Langsung Tunai), kegiatan kepemudaan dan kelompok sadar wisata.

Kata Kunci: Desa, Alokasi Dana Desa, Pembangunan Ekonomi

PENDAHULUAN

Pembangunan desa merupakan salah satu prioritas utama pembangunan nasional karena desa memiliki peran strategis sebagai basis ekonomi dan sosial masyarakat Indonesia. Meskipun berbagai kebijakan telah diluncurkan, permasalahan minimnya pembangunan desa, khususnya di wilayah terpencil, masih menjadi tantangan besar hingga saat ini. Ketimpangan pembangunan antara desa dan kota tampak dari keterbatasan infrastruktur dasar, rendahnya produktivitas ekonomi masyarakat, dan lemahnya daya saing ekonomi lokal. Kondisi ini semakin

relevan untuk dikaji saat ini karena pemerintah terus menggulirkan alokasi dana desa dalam jumlah besar setiap tahun, namun efektivitasnya dalam mendorong pembangunan ekonomi desa sering kali belum optimal.
Salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat terhadap percepatan pembangunan desa adalah melalui Alokasi Dana Desa (ADD**)**. Sejak beberapa tahun terakhir, dana ini menjadi instrumen penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan infrastruktur, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, berbagai laporan dan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa implementasi ADD sering kali masih terfokus pada pembangunan fisik semata dan belum sepenuhnya menyentuh aspek pemberdayaan ekonomi masyarakat. Akibatnya, dana yang besar belum mampu sepenuhnya menciptakan dampak berkelanjutan terhadap kesejahteraan masyarakat desa. Kondisi ini juga terlihat jelas pada Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah.

Berdasarkan data APBDes, desa ini menerima dana desa yang cenderung meningkat setiap tahun, yakni sebesar Rp1,7 miliar pada 2021, naik menjadi Rp1,78 miliar pada 2024, dengan total akumulasi empat tahun sebesar Rp6,94 miliar. Meskipun alokasi dana relatif besar, pemanfaatannya masih didominasi pembangunan infrastruktur jalan usaha tani, jalan lingkungan, dan sarana kesehatan. Sementara itu, dukungan terhadap kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pelatihan UMKM, penguatan BUMDes, dan pengembangan desa wisata, masih sangat terbatas. Padahal desa ini memiliki potensi ekonomi lokal yang besar—meliputi sektor kuliner (Pasar Bambu, Pawon 21), kerajinan tenun, budidaya jamur tiram, dan agrowisata—yang jika dikembangkan optimal dapat menjadi penggerak utama ekonomi desa. Kesenjangan antara potensi ekonomi desa dan realisasi pemanfaatan dana desa ini menunjukkan adanya gap implementasi kebijakan ADD yang perlu dikaji secara mendalam. Jika tidak ditangani, maka dana desa berpotensi besar hanya menjadi instrumen pembangunan jangka pendek tanpa menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting dan relevan dilakukan saat ini untuk mengidentifikasi bagaimana implementasi ADD di Desa Bonjeruk dalam mendorong pembangunan ekonomi lokal serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi pemerintah desa dan pemangku kebijakan dalam meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program ADD, sehingga dana publik benar-benar mampu memperkuat fondasi ekonomi desa. Dalam penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III yang menekankan empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi (Edwards III dalam Pitoi dkk., 2024). Keempat faktor ini menjadi kerangka penting untuk menilai sejauh mana kebijakan ADD dapat berjalan efektif dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan desa.

Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti peran Alokasi Dana Desa (ADD) dalam mendukung pembangunan desa. Misalnya, (Amalia, Dina, Achluddin Ibnu Rochim, (2024)menemukan bahwa implementasi ADD di Desa Dadapan berjalan cukup optimal, namun masih menghadapi kendala komunikasi antarpihak. Penelitian Gobel, (n.d.) menunjukkan bahwa ADD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah secara agregat.Lili, (2018) menegaskan bahwa pengelolaan ADD sesuai regulasi dapat meningkatkan sarana prasarana desa sekaligus memperkuat kapasitas ekonomi masyarakat. Selain itu, Arfianto, Arif Eko Wahyudi, (2014)(Wahyuni & Yulistiyono, 2021) menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan Musrenbangdes sebagai faktor keberhasilan program pembangunan desa. Sebaliknya, Sutisna & Widyawati (2022) menemukan keterbatasan transparansi pada tahap pelaksanaan, misalnya kurangnya informasi publik mengenai pengelolaan dana. Meskipun studi-studi tersebut memberikan kontribusi penting, sebagian besar masih berfokus pada aspek akuntabilitas, transparansi, dan proses implementasi ADD secara umum. Penelitian mengenai dampak langsung ADD terhadap pengembangan sektor ekonomi lokal—seperti UMKM, pertanian, dan pariwisata masih sangat terbatas. Padahal sektor-sektor tersebut merupakan penggerak utama ekonomi desa dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kemandirian ekonomi masyarakat. Belum banyak kajian empiris yang menggali bagaimana ADD dimanfaatkan untuk memperkuat potensi lokal dan mengatasi kesenjangan ekonomi desa.

Dengan demikian, gap riset yang ingin dijawab oleh penelitian ini adalah kurangnya bukti empiris mengenai bagaimana implementasi ADD berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi lokal berbasis potensi desa. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan proses implementasi ADD, tetapi juga mengkaji perannya dalam mendukung aktivitas ekonomi produktif di sektor UMKM, pertanian, dan pariwisata di Desa Bonjeruk. Dengan menyoroti dimensi ini, penelitian diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai efektivitas kebijakan dana desa dalam konteks pembangunan ekonomi lokal, sekaligus memberikan masukan kebijakan yang lebih terarah.

TINJAUAN PUSTAKA / KAJIAN TEORITIS

Implementasi Alokasi Dana Desa (ADD)

Menurut George C. Edwards III, implementasi kebijakan merupakan proses menerjemahkan keputusan politik ke dalam tindakan nyata yang menghasilkan dampak bagi masyarakat. Edwards mengemukakan empat variabel utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yakni komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. a. Komunikasi mengacu pada sejauh mana pesan dan kebijakan disampaikan secara jelas, konsisten, dan dipahami oleh pelaksana kebijakan di tingkat desa. Jika komunikasi tidak berjalan baik, kebijakan akan mudah mengalami distorsi saat diterapkan. Dalam konteks ADD, komunikasi mencakup penyampaian informasi mengenai prioritas penggunaan dana, mekanisme pelaksanaan, dan target program pembangunan kepada pemerintah desa dan masyarakat. 2. Sumber daya meliputi sumber daya manusia (SDM), dana, peralatan, teknologi, serta kapasitas kelembagaan desa. Kebijakan yang baik akan gagal apabila pelaksana tidak memiliki sumber daya memadai. Dalam implementasi ADD, sumber daya menjadi faktor kunci untuk memastikan dana desa benar-benar dimanfaatkan sesuai prioritas pembangunan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. c. Disposisi mencerminkan komitmen, motivasi, dan integritas pelaksana kebijakan. Aparat desa dengan disposisi yang kuat akan lebih bertanggung jawab dan konsisten dalam melaksanakan program ADD. Sebaliknya, disposisi yang lemah dapat menyebabkan penyimpangan dan pelaksanaan program yang tidak efektif. d. Struktur birokrasi mencakup mekanisme, prosedur, dan tata kelola pelaksanaan kebijakan. Struktur yang jelas akan memperlancar pelaksanaan ADD, sedangkan struktur yang rumit dan tidak terkoordinasi akan menghambat pencapaian tujuan.
Teori ini sangat relevan dengan konteks Desa Bonjeruk, di mana efektivitas pelaksanaan ADD sangat dipengaruhi oleh kejelasan komunikasi dalam musyawarah desa, ketersediaan sumber daya aparatur, komitmen perangkat desa, serta mekanisme birokrasi yang berlaku di tingkat lokal.

Sejumlah penelitian mendukung kerangka teoritis ini. Amalia, Dina, Achluddin Ibnu Rochim, (2024) menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi ADD dipengaruhi oleh koordinasi dan komunikasi antarpihak. Sutisna & Widyawati (2022) menyoroti transparansi dan struktur birokrasi yang belum optimal sebagai faktor penghambat pelaksanaan ADD.Agustina & Simarmata, (2022) menunjukkan bahwa efektivitas pelaksanaan ADD berdampak signifikan terhadap peningkatan perekonomian daerah, terutama di wilayah pedesaan. Penelitian Lili, (2018) menambahkan bahwa sumber daya aparatur dan mekanisme birokrasi yang baik memperkuat peran ADD dalam meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat.

Pembangunan Ekonomi Desa

Pembangunan ekonomi desa merupakan proses peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat desa melalui pengelolaan potensi lokal secara berkelanjutan. Menurut Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, pembangunan ekonomi desa mencakup peningkatan akses infrastruktur dasar, pemberdayaan UMKM, penguatan kelembagaan ekonomi (BUMDes), serta pengembangan sektor unggulan seperti pertanian, wisata, dan kerajinan lokal. Pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dari pembangunan fisik, tetapi juga dari peningkatan kapasitas produktif masyarakat, penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dan kemandirian ekonomi desa. Dalam konteks Desa Bonjeruk, sektor kuliner (Pasar Bambu, Pawon 21), pertanian (budidaya jamur tiram), dan kerajinan (tenun tradisional) menjadi potensi strategis untuk dikembangkan. Gobel, (n.d.) menemukan bahwa ADD berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi desa di Indonesia. Lili, (2018) menekankan bahwa penggunaan ADD secara strategis mampu memperkuat UMKM dan sektor produktif lainnya. Penelitian (Wahyuni, Mia Eka, (2021)(Wahyuni & Yulistiyono, 2021) menegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa memperkuat keberlanjutan pembangunan ekonomi. Temuan ini mengindikasikan bahwa pembangunan ekonomi desa sangat bergantung pada efektivitas implementasi ADD di tingkat akar rumput.

Hubungan Antar Variabel: Implementasi ADD dan Pembangunan Ekonomi Desa

Secara teoritis, implementasi kebijakan ADD yang kuat akan menciptakan kondisi yang mendukung pembangunan ekonomi desa. Komunikasi yang jelas dan partisipatif akan memastikan program pembangunan sesuai kebutuhan masyarakat. Sumber daya aparatur dan kelembagaan yang memadai memungkinkan dana ADD dikelola secara efektif. Disposisi aparat desa yang berintegritas akan mendorong pelaksanaan program yang transparan dan tepat sasaran. Struktur birokrasi yang sederhana dan efisien akan mempercepat realisasi program.
Sebaliknya, apabila implementasi ADD lemah—misalnya komunikasi yang tidak transparan, sumber daya terbatas, disposisi rendah, dan struktur birokrasi yang kaku—maka penggunaan dana desa cenderung hanya

berfokus pada pembangunan fisik dan belum menyentuh sektor produktif seperti UMKM, pertanian, dan pariwisata. Hal inilah yang menjadi dasar gap penelitian dalam studi ini, karena belum banyak penelitian empiris yang menganalisis hubungan langsung antara implementasi ADD dan pembangunan ekonomi lokal berbasis potensi desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif dilandaskan pada tujuan yang ingin dicapai yaitu menggambarkan secara numerik bagaimana implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Upaya Pembangunan ekonomi di desa Bonjeruk. Penelitian dilaksanakan di Desa Bonjeruk, yang dipilih secara purposive karena desa ini memiliki potensi ekonomi lokal yang beragam serta menerima ADD dalam jumlah yang signifikan pada periode 2021-2025. Data numerik meliputi dokumen APBDes 2021-2025, data potensi dan perkembangan desa, laporan realisasi anggaran. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumetasi dan wawancara singkat yang digunakan sebagai data pendukung untuk memperjelas beberapa informasi dari data kuantitaif. Data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif kuantitatif berupa penyajian tabel, persentase, dan distribusi data untuk menggambarkan implementasi alokasi dana desa (ADD).

HASIL PENELITIAN

Implementasi Alokasi Dana desa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Bonjeruk mengalami tren meningkat dalam periode 2021–2025. APBDes pada tahun 2021 sebesar Rp 2,75 miliar, kemudian naik menjadi Rp 2,97 miliar pada tahun 2022, dan mencapai titik tertinggi pada tahun 2023 sebesar Rp 3,20 miliar. Pada tahun 2024 terjadi penurunan menjadi Rp 3,01 miliar, namun kembali meningkat pada tahun 2025 sebesar Rp 3,11 miliar. Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh peningkatan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang menjadi sumber pendapatan utama desa.

Tabel 1
Alokasi APBDes Desa Bonjeruk Tahun 2021-2025

Tahun	Total Pendapatan (Rp)	Dana Desa (DD) (Rp)	Alokasi Dana Desa (ADD) (Rp)	Bagi Hasil Pajak & Retribusi (Rp)	Bantuan Keuangan Kab/Kota (Rp)	Pendapatan Asli Desa (Rp)
2021	2.756.502.907	1.701.062.000	864.973.364	80.139.810	49.200.000	61.127.734
2022	2.975.249.714	1.703.251.000	955.382.280	88.816.434	149.200.000	78.600.000
2023	3.207.320.108	1.912.612.000	883.171.280	140.336.828	229.200.000	42.000.000
2024	3.015.865.159	1.823.417.000	983.366.240	136.081.919	63.000.000	10.000.000
2025	3.116.567.036	1.781.637.000	1.062.024.240	161.134.596	102.113.200	10.000.000
Total	15.071.504.924	8.921.637.000	4.748.917.404	606.509.587	592.713.200	201.727.734

Sumber: Data APBDes Desa Bonjeruk Tahun 2021-2024

Hasil wawancara dengan Kepala desa, Sekretaris Desa, BPD, serta tokoh masyarakat menunjukkan bahwa perencanaan ADD di desa Bonjeruk dilakukan melalui musyawarah desa (Musrenbangdes) dan dituangkan dalam rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Secara umum, alokasi dana lebih banyak diarahkan pada pembangunan fisik berupa infrastruktur seperti perbaikan jalan lingkungan pemukiman, jalan usaha tani, pemeliharaan sanitasi pemukiman, dan sarana kesehatan. Kegiatan non-fisik seperti pelatihan usaha, penguatan BUMDes, dan pemberdayaan Masyarakat masih terbatas porsinya. Hal iini sesuai dengan data alokasi dana desa tahun 2021-2024 yang menunjukkan peningkatan anggaran, tetapi penyerapan dana tetap lebih dominan pada sektor infrastruktur.

Tabel 2.

Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Bonjeruk

No	Indikator	Hasil Wawancara
1	*Perencanaan ADD dituangkan dalam APBDes berdasarkan RKPDes*	Disusun melalui musyawarah desa, melibatkan masyarakat, tokoh pemuda, dan BPD
2	*Prioritas Penggunaan ADD*	Lebih banyak diarahkan pada pembangunan fisik (jalan desa, drainase, irigasi), sedangkan pemberdayaan masih terbatas
3	Peran Perangkat desa	Sekretaris Desa menyusun rancangan APBDes, diverifikasi Kepala Desa, ditetapkan melalui Perdes
4	Partisipasi Masyarakat	terlibat dalam musyawarah, meski sebagian masih pasif dalam menyampaikan aspirasi
5	Transparansi	informasi diumumkan melalui papan informasi desa dan media sosial, namun belum semua masyarakat memahami detail anggaran

Sumber: (Informan, diolah oleh peneliti, 2025)

Berdasarkan tabel 2 diatas, perencanaan implementasi Alokasi Dana Desa bersumber dari perencanaan yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang merupakan langkah awal dalam pengelolaan keuangan desa. Implementasi Alokasi Dana Desa telah sesuai dengan regulasi, tetapi masiih terdapat ketimpangan antara pembangunan fisik dan non-fisik. Kondisi ini sejalan dengan penelitian sebelumnya (Agustina & Simarmata, 2022; Lili, 2018)yang menunjukkan kecendrungan desa lebih memprioritaskan pembangunan infrastruktur dibandingkan dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Partisipasi dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa

Partisipasi masyarakat dalam pengelolaan ADD Desa Bonjeruk terwujud pada tiga tahap, yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Pada tahap perencanaan, partisipasi masyarakat terlihat dalam kehadiran mereka di musyawarah desa, meskipun keterlibatan aktif dalam menyampaikan aspirasi masih terbatas. Pada tahap pelaksanaan, partisipasi tampak dalam kegiatan gotong royong membangun jalan dan sarana desa. Namun, pada tahap pengawasan, partisipasi masyarakat umum relatif rendah dan lebih banyak diserahkan kepada BPD serta tokoh masyarakat.

Tabel 3
Indikator Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan ADD Desa Bonjeruk

No	Tahap	Bentuk Partisipasi	Wawancara
1	*Perencanaan*	Kehadiran masyarakat desa Bonjeruk dalam musyawarah desa	Masyarakat hadir, namun sebagian pasif dalam memberikan usulan
2	*Pelaksanaan*	Gotong royong desa	Terlibat aktif, terutama pemuda dan kelompok tani disetiap kegiatan gotong royong dusun
3	Pengawasan	Pengawasan melalui BPD dan tokoh masyarakat	Partisipasi Masyarakat umum rendah

Sumber: (Informan, diolah oleh peneliti, 2025)

Berdasarkan tabel 3, partisipasi ini dapat dipandang cukup baik pada tahap pelaksanaan, tetapi masih lemah pada aspek pengawasan dan evaluasi. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi kontrol sosial masyarakat belum berjalan optimal. Dalam konteks teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, faktor komunikasi dan disposisi aparat desa berperan penting dalam meningkatkan partisipasi. Ketika informasi penggunaan dana belum disampaikan secara transparan dan sederhana, maka pemahaman masyarakat juga terbatas, sehingga menurunkan tingkat partisipasi kritis.

Kontribusi Terhadap Pembangunan Ekonomi

Tabel 4
Bidang Pembangunan Fisik dan Non-Fisik Desa Bonjeruk 2024-2025

No	Jenis Pembangunan	Jumlah Anggaran (Rp)	Persentase %
1	Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani	466.645.000,00	27,33%
2	Pembangunan jalan lingkungan pemukiman	376.565.000,00	22,05%
3	Pengelolaan dan pembinaan posyandu	206.755.960,00	12,11%
4	Pengadaan dan penyelenggaraan pos keamanan desa	144.000.000,00	8,43%
5	Pemeliharaan sanitasi pemukiman	37.600.000,00	2,20%
6	Penyelenggaraan PAUD dan sarana PAUD	10.000.000,00	0,59%
7	Penguatan kapasitas tenaga keamanan	27.600.000,00	1,62%
8	Pemberdayaan Perempuan melalui PKK	23.975.000,00	1,40%
9	Penyelenggara Festival kesenian, adat/kebudayaan, dan keamanan	223.693.000,00	13,10%
10	Penanganan keadaan mendesak (BLT) Desa	190.800.000,00	11,17%
11	Total	1.707.633.960,00	100,00%

Sumber: Data Desa Bonjeruk

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Pembangunan yang ada di desa Bonjeruk semuanya memanfaatkan dana yang bersumber dari Pendapatan Asli Desa (PAD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Desa (DD), Bagi Hasil dan Retribusi Pajak Daerah (DBHP), Pendapatan lain-lain yang sah. Berdasarkan Tabel 4.6, dapat diketahui bahwa total anggaran pembangunan Desa Bonjeruk pada tahun 2025 mencapai sebesar Rp1.707.000.000, yang terbagi ke dalam dua kelompok besar, yaitu bidang pembangunan fisik dan bidang pembangunan non-fisik. Pada bidang pembangunan fisik, porsi anggaran terbesar dialokasikan untuk kegiatan yang secara langsung menunjang infrastruktur desa, di antaranya pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani sebesar Rp466.700.000 atau sekitar 27,33 persen dari total dana, pembangunan jalan lingkungan sebesar Rp377.000.000 atau 22,05 persen, serta pembangunan saluran irigasi pertanian sebesar Rp239.000.000 atau 14 persen. Ketiga kegiatan tersebut menyerap lebih dari 60 persen total anggaran yang tersedia, sehingga menunjukkan bahwa arah kebijakan pembangunan Desa Bonjeruk masih berfokus pada penguatan infrastruktur fisik yang mendukung aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor pertanian dan perdagangan hasil tani.

Sementara itu, kegiatan pembangunan non-fisik meliputi berbagai upaya yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dan sosial budaya masyarakat desa. Beberapa di antaranya mencakup kegiatan Posyandu sebesar Rp207.000.000 atau 12,11 persen, Festival Kebudayaan Desa sebesar Rp224.000.000 atau 13,10 persen, kegiatan PKK sebesar Rp24.000.000 atau 1,40 persen, serta kegiatan PAUD sebesar Rp10.000.000 atau 0,59 persen. Persentase alokasi dana yang relatif kecil pada bidang non-fisik menggambarkan bahwa pembangunan manusia melalui sektor pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan perempuan masih belum menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan tahun tersebut. Namun demikian, keberadaan program-program sosial dan kebudayaan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah desa mulai berupaya menyeimbangkan antara pembangunan material dengan pembangunan manusia sebagai dasar tercapainya kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

Grafik 1
Pembangunan Fisik dan Non-Fisik di Desa Bonjeruk Tahun 2025

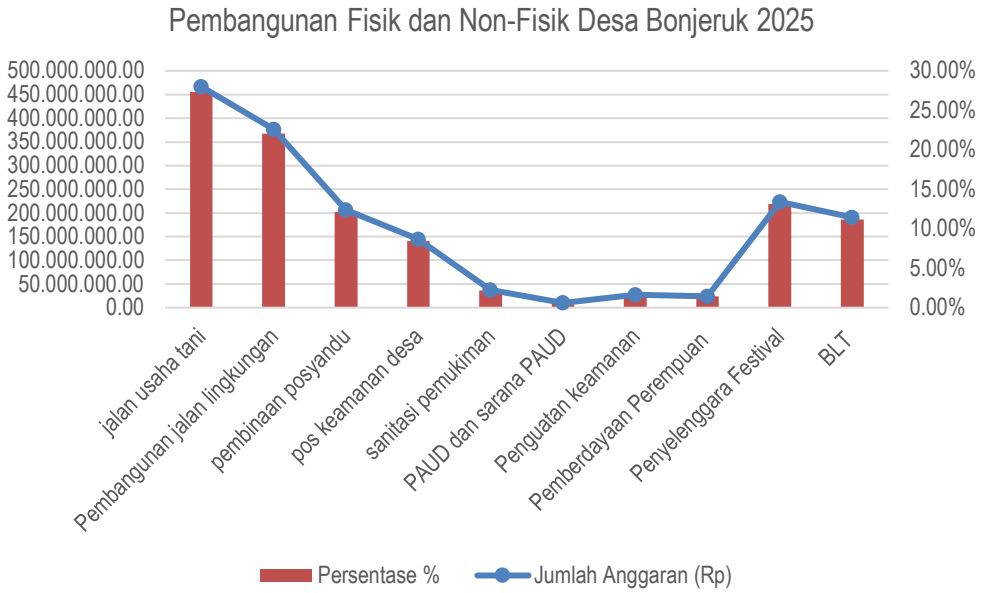

Sumber: Data diolah penulis

Grafik 1 memperlihatkan perbandingan visual antara kegiatan fisik dan non-fisik berdasarkan dana yang dialokasikan. Batang tertinggi pada diagram terlihat pada kegiatan Pembangunan jalan usaha tani dan Pembangunan jalan lingkungan, yang masing-masing menempati posisi dominan dalam total anggaran. Sememtara itu, batang dengan ketinggian menengah ditunjukkan oleh kegiatan Pembangunan irigasi dan festival kebudayaan, yang perepresentasikan keseimbangan antara kegiatan ekonomi dan social-budaya. Adapun batang dengan ketinggian paling rendah tampak pada kegiatan PKK dan PAUD, yang menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan perempuan dan pendidikan anak usia dini masih mendapat porsi anggaran yang terbatas. Secara keseluruhan, diagram batang tersebut menggambarkan pola pembangunan desa yang masih berorientasi pada kegiatan fisik dengan dampak ekonomi langsung, namun secara bertahap mulai mengintegrasikan aspek sosial, budaya, dan pemberdayaan Masyarakat. Kondisi ini menunjukkan bahwa fokus pembangunan Desa Bonjeruk tahun 2025 masih bersifat material-oriented, tetapi sudah mengarah pada model pembangunan yang lebih inklusif dengan mempertimbangkan keseimbangan antara pembangunan infrastruktur dan pembangunan manusia. Dalam jangka panjang, kebijakan semacam ini diharapkan dapat mendorong terciptanya pembangunan desa yang tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperkuat aspek sosial, budaya, dan kapasitas sumber daya manusia sebagai fondasi utama pembangunan berkelanjutan.

Dampak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Alokasi Dana Desa berperan dalam mendukung kesejahteraan sosial, terutama pada masa pandemi Covid-19 melalui Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang membantu kelompok miskin memenuhi kebutuhan dasar. Selain itu, ADD juga digunakan untuk kegiatan kepemudaan, keagamaan, serta pelestarian budaya desa. Setiap tahun, desa menyisihkan anggaran untuk kegiatan kepemudaan, seperti lomba peringatan Hari Kemerdekaan 17 Agustus, kegiatan olahraga, hingga acara keagamaan. Dukungan ini memperlihatkan bahwa ADD tidak hanya mendorong pembangunan ekonomi, tetapi juga memperkuat identitas budaya dan kohesi sosial. Pada aspek Kesehatan Masyarakat, Alokasi Dana Desa digunakan untuk mendukung pengelolaa posyandu dan penyediaan sarana sanitasi. Adanya posyandu yang aktif membantu pemantauan tumbuh kembang anak, penyuluhan kesehatan ibu dan balita, serta pelayanan imunisasi. Tidak hanya itu, ADD juga berdampak pada pelestarian budaya dan identitas lokal. Beberapa produk khas Desa Bonjeruk, seperti kuliner ayam merangkat mulai dipatenkan dan dipromosikan melalui dukungan dana desa.

PEMBAHASAN

Implementasi Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Ekonomi

Fokus pertama dalam penelitian ini akan membahas Pengimplementasian Alokasi Dana Desa di Desa Bonjeruk dalam Pembangunan ekonomi. ADD mempunyai peran penting dalam proses pembangunan desa karena digunakan untuk membiayai operasional pemerintahan, pembangunan fisik, dan pemberdayaan masyarakat. Perkembangan ADD Desa Bonjeruk menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dalam kurun waktu penelitian. Dalam perspektif teori Edwards III, kenaikan ADD dapat dimasukkan ke dalam aspek **sumber daya**, yang menyatakan bahwa implementasi kebijakan akan efektif apabila sumber daya yang tersedia mencukupi. Dengan meningkatnya ADD, pemerintah desa memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk melaksanakan program-program pembangunan secara optimal.

Kondisi empiris di Desa Bonjeruk sejalan dengan penelitian Amalia, Dina, Achluddin Ibnu Rochim, (2024) yang menemukan bahwa partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa meningkatkan transparansi dan efektivitas implementasi ADD. Namun, penelitian ini juga memperlihatkan bahwa fokus utama masih pada pembangunan fisik. Orientasi ini berbeda dengan temuan Lili, (2018) yang menekankan bahwa pengelolaan ADD di Desa Magmagan Karya sudah lebih seimbang antara pembangunan fisik dan pemberdayaan masyarakat. Perbedaan ini dapat dijelaskan secara logis oleh karakteristik Desa Bonjeruk yang masih sangat bergantung pada sektor pertanian, sehingga infrastruktur jalan dan irigasi dianggap lebih mendesak dibandingkan pemberdayaan nonfisik. Kenaikan APBDes selama tahun 2021–2025 menunjukkan peningkatan kapasitas fiskal Desa Bonjeruk dalam mendukung kegiatan pembangunan. Tren peningkatan APBDes sejalan dengan kebijakan pemerintah mengenai penguatan dana transfer ke desa. Hal ini juga konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa peningkatan APBDes mempengaruhi kemampuan desa dalam pemenuhan kebutuhan pembangunan dan layanan dasar masyarakat. Peningkatan APBDes juga mencerminkan efektivitas pemerintah desa dalam pengelolaan sumber pendapatan, meskipun PADes masih sangat rendah. Ketergantungan terhadap transfer pusat dan daerah masih menjadi tantangan yang perlu diperhatikan untuk memperkuat kemandirian fiskal desa.

Kontribusi Alokasi Dana Desa Terhadap Pembangunan Ekonomi dalam Mensejahterahkan Masyarakat

Dominannya alokasi belanja fisik menunjukkan bahwa Desa Bonjeruk masih menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas masyarakat. Pembangunan jalan usaha tani dan jalan lingkungan memberikan dampak langsung terhadap peningkatan aktivitas ekonomi desa, terutama sektor pertanian. Namun alokasi belanja nonfisik yang masih berada pada kisaran 30–40% menunjukkan bahwa kegiatan pemberdayaan masyarakat belum menjadi fokus utama. Padahal, pembangunan nonfisik seperti pelatihan, pendidikan, dan pembinaan ekonomi sangat penting untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam jangka panjang. Menurut Edwards III, implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh sumber daya (anggaran), tetapi juga oleh faktor komunikasi, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Rendahnya proporsi kegiatan nonfisik menunjukkan perlunya penguatan dalam aspek komunikasi dan pemberdayaan aparatur desa agar kegiatan nonfisik dapat berjalan lebih optimal dan menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Temuan penelitian menunjukkan bahwa ADD memberikan dampak positif bagi pembangunan fisik maupun nonfisik. Dampak fisik terlihat dari pembangunan infrastruktur yang meningkatkan akses dalam distribusi hasil pertanian dan memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat. Dampak nonfisik terlihat dari kegiatan sosial seperti posyandu, PAUD, dan pembinaan UMKM yang berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Namun demikian, dampak program nonfisik belum merata dan cenderung sporadis. Hal ini mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas dan berkelanjutan.

SIMPULAN DAN SARAN

Temuan penelitian terkait Implementasi Alokas Dana Desa dalam Upaya Pembangunan Ekonomi di Desa Bonjeruk Kecamatan Jonggat Kabupaten Lombok Tengah. implementasi Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bonjeruk telah berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dasar, bantuan sosial, serta dukungan terhadap kesehatan, pendidikan, dan budaya. Namun, orientasi penggunaan dana masih lebih dominan pada pembangunan fisik dibandingkan pemberdayaan nonfisik, sehingga manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan secara merata, terutama bagi pelaku usaha dan

kelompok perempuan. Analisis dengan teori implementasi kebijakan Edwards III menunjukkan bahwa aspek komunikasi dan disposisi sudah berjalan efektif, tetapi masih terdapat hambatan pada aspek sumber daya dan struktur birokrasi. Untuk itu, diperlukan penguatan program pemberdayaan masyarakat agar implementasi ADD tidak hanya menghasilkan pembangunan fisik, tetapi juga mampu meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Penelitian selanjutnya disarankan menelaah efektivitas program nonfisik dan dampak jangka panjang ADD terhadap kemandirian ekonomi desa sehingga peran ADD dapat dipahami lebih komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

Agustina, R., & Simarmata, M. Y. (2022). Tindak Tutur Lokusi dalam Novel Tentang Kamu Karya

Amalia, Dina, Achluddin Ibnu Rochim, and D. R. (2024). Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) guna Menunjang Pembangunan di Desa Dadapan Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, *4*(02), 125–131.

Arfianto, Arif Eko Wahyudi, and A. R. U. B. (2014). Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan ekonomi desa. *JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik)*, *2*(1), 53–66.

Gobel, Y. P. (n.d.). Implementasi Pemanfaatan Alokasi Dana Desa (Add) Terhadap Kinerja Perekonomian Daerah di Indonesia. *AKASYAH: Jurnal Akuntansi*.

Latif, Muh Rais Mukram, Ansyarif Khalid, and S. S. (2023). Implementasi Alokasi Dana Desa di Desa Bontoala Kab. Gowa Dalam Mewujudkan Pembangunan. *Journal Economic Excellence Ibnu Sina*, *1*(3), 01–09.

Liani, Y., Takari, D., & Ompusunggu, D. P. (2024). Analisis Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Dana Desa dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Gunung Mas Tahun 2022. *Jurnal Syntax Admiration*, *5*(11), 4810–4825. https://doi.org/10.46799/jsa.v5i11.1760

Lili, M. A. (2018). Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam upaya meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat di desa magmagan karya kecamatan lumar. *Jurnal Ekonomi Daerah (JEDA)*, *7*(1).

Sholahudin, Umar, and A. S. (2022). Alokasi Dana Desa (ADD) dan Kemandirian Sosial-Ekonomi Masyarakat Desa: Kasus di Desa Senduro, Kabupaten Lumajang. *Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis*, *7*(1), 44.

Wahyuni, Mia Eka, and H. Y. (2021). Implementasi Tata Kelola Dana Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa: Studi Kasus di Desa Sumberingin, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang. *Jurnal Ilmiah Aset*, *23*(2), 155–166.

Wahyuni, M. E., & Yulistiyono, H. (2021). Implementasi Tata Kelola Dana Desa dalam Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus di Desa Sumberingin, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang). *Jurnal Ilmiah Aset*, *23*(2), 155–166. https://journal.widyamanggala.ac.id/index.php/jurnalaset/article/view/185